

**PROGRAM KERJA
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG - RI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi memiliki kekuasaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan serta pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan aparat pada semua Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Dalam rangka tugas tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung diberi tugas secara fungsional melakukan pengawasan internal pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Sebagai sebuah institusi, Badan Pengawasan harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Salah satu diantaranya adalah membuat perencanaan dalam bentuk program kerja tahunan yang akan menjadi acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengawasan Mahkamah Agung selama tahun anggaran 2019

Penyusunan program kerja bagi instansi pemerintah semakin terasa pentingnya karena Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengharuskan agar setiap instansi pemerintah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang memiliki orientasi dan keterukuran output dan outcom sebagai saran penilaian indikator keberhasilan. Dengan demikian program kerja tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung merupakan perwujudan dari RKAKL dan DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Program Kerja Badan Pengawasan tidak hanya mencakup pelaksanaan pengawasan dalam bentuk pembinaan (preventif) dan penanganan pengaduan (reprsessif), tetapi juga mencakup program yang terkait dengan pembinaan dan kordinasi pelaksanaan pengawasan pada pengadilan tingkat banding. Program ini merupakan bagian dari uaya pemberdayaan peran peradilan tingkat banding sebagai kawal terdepan Mahkamah Aagung dalam melakukan pengawasan, sehingga tugas pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding selalu sejalan dengan tugas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengawasan Mahkamah Agung

BAB II

LANDASAN KERJA

A. Landasan Yuridis

B. Visi dan Misi

1. Visi :

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

2. Misi :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
- b. Mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan :

- a. Tersedianya rencana pengawasan.
- b. Tersedianya bahan kebijakan pengawasan.
- c. Tersedianya sumber daya pengawas yang berkualitas.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai.
- e. Terlaksananya pengawasan melekat dan fungsional.
- f. Terpenuhinya pelayanan pengaduan masyarakat.
- g. Tersedianya perangkat publikasi kegiatan pengawasan.

2. Sasaran Strategis :

- a. Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal
- b. Presentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
- c. Presentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi

BAB III

KONDISI DAN PERMASALAHAN

A. KONDISI

Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pengembangan perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan, maka perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam kondisi Badan Pengawasan yaitu :

1. Kelembagaan.

Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Badan Pengawasan yang dipimpin oleh Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan susunan organisasi yang terdiri satu sekretariat Badan dan empat Inspektorat.

2. Sumber Daya Manusia.

- a. Jumlah Hakim Tinggi Pengawas sampai dengan Januari 2019 berjumlah 42 orang sedangkan idealnya 66 orang.
- b. Jumlah Hakim Yustisial sampai dengan Januari 2019 berjumlah 19 orang.
- c. Tenaga fungsional auditor sampai dengan Januari 2019 berjumlah 12 orang sedangkan idealnya 33 orang.
- d. Tenaga fungsional auditor kepegawaian sampai dengan Januari 2019 berjumlah 8 orang.
- e. Pejabat eselon III sebanyak 4 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 16 orang.
- f. Tenaga fungsional kepegawaian pada Badan Pengawasan berjumlah 1 orang dan idealnya sebanyak 10 orang.
- g. Tenaga fungsional tertentu pada Badan Pengawasan berjumlah 2 orang dan idealnya sebanyak 10 orang.
- h. Jumlah tenaga staf yang ada sebanyak 41 orang sedangkan idealnya sebanyak 50 orang, sementara kekurangan tenaga diisi oleh tenaga honorer 16 orang diantaranya 6 orang untuk pengemudi

3. Sumber Dana.

Anggaran Badan Pengawasan yang tertampung tahun 2019 sebesar Rp. 33.552.299.000,-

4. Sarana dan Prasarana.

Untuk mendukung kelancaran Tupoksi Badan Pengawasan perlu ditindaklanjuti dalam pembagian tugas personalia yang bertanggungjawab terhadap hasil pengadaan aplikasi pengawasan, ortala dan umum dan kepegawaian Tahun anggaran 2019 sehingga sistem informasi mendukung pengambilan keputusan pimpinan Badan Pengawasan MA RI.

5. Lingkup Kerja Badan Pengawasan.

Lingkup kerja Badan Pengawasan meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di semua lingkungan peradilan ± 917 satuan kerja dengan wilayah yang luas dan sulit dijangkau dan sering menghadapi kendala di bidang transportasi, komunikasi, iklim, cuaca, hambatan-hambatan goeografis, politik, sosial, budaya, dan adat istiadat setempat. Selain itu dengan adanya kebijakan dua DIPA di setiap satker berdampak pada luasnya cakupan pemeriksaan yang mencapai ± 1910 unit pelaporan.

6. Sasaran pengawasan

Sasaran pengawasan meliputi: penyelenggaraan peradilan, perilaku hakim dan aparat peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, serta pelayanan publik yang berpotensi menimbulkan resiko bahaya terhadap fisik dan mental.

7. Wajah Peradilan Dewasa ini.

- a. Harus disadari dan diakui bahwa salah satu situasi dan kondisi kritis yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini adalah merosotnya kehormatan dan wibawa lembaga peradilan sampai pada titik paling rendah yang belum pernah terjadi sampai saat ini dalam sejarah peradilan di Indonesia, disebabkan oleh lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dunia peradilan.
- b. Kondisi demikian muncul dari akumulasi kekecewaan para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya yang diakibatkan oleh buruknya mutu pelayanan publik peradilan yang merupakan muara dari berbagai tindakan dan sifat negatif para aparat peradilan antara lain yang perlu pembenahan secara terus menerus.

8. Tantangan Kedepan.

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi berkesimpulan bahwa situasi dan kondisi dunia peradilan di Indonesia sekarang ini telah berada pada titik kritis yang harus diperbaiki.

B. TANTANGAN

1. Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2. Keterbatasan sumber daya yang tersedia.
3. Masih rendahnya dukungan yang berkelanjutan dan komitmen baik dari internal maupun eksternal secara terus menerus.
4. Belum adanya pedoman mengenai APIP.
5. Luasnya jangkauan pengawasan dan semakin bertambahnya jumlah satuan kerja pengadilan di Indonesia.
6. Harapan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Badan Pengawasan untuk menjadi motor penggerak perubahan serta jendela Mahkamah Agung sehingga menuntut adanya integritas tinggi, profesionalisme serta kreatif dan komunikatif dalam menyiasati kelemahan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

C. PERMASALAHAN.

Memperhatikan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan yang seharusnya (ideal), maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara untuk mendekati kondisi yang ada dengan yang seharusnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan program kerja yang menyeluruh agar memperkuat sistem, mekanisme dan kinerja Badan Pengawasan yang efisien, efektif dan fleksibel.

BAB IV

PROGRAM KERJA

A. KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam program Badan Pengawasan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun kebijakan pengawasan sebagai berikut :

1. Menggunakan pendekatan holistik terhadap pengembangan yang diperoleh atas analisis menyeluruh penyebab kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang ideal.
2. Memprioritaskan kelancaran pelaksanaan pengawasan dan strategi pengurangan kesenjangan berbagai komponen baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawasan.
3. Merancang tindakan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan efisiensi keseluruhan dalam proses pelaksanaan pengawasan.
4. Memperkuat fungsi Badan Pengawasan sebagai Quality Assurance Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya..
5. Melakukan sosialisasi pengawasan ke daerah-daerah.
6. Mempublikasikan kegiatan pengawasan dan hasil-hasilnya agar diketahui masyarakat melalui teknologi informasi.
7. Melakukan koordinasi, komunikasi dan evaluasi wilayah secara intensif dan sistimatis.
8. Mengefektifitaskan kerjasama antar Instansi
9. Memperbaiki Sistem Perencanaan berbasis Manajemen Risiko.
10. Peningkatan SDM Pengawasan dengan menambah jumlah personil Hakim Tinggi dan Auditor.
11. Meningkatkan kegiatan yang bersifat consulting kepada Satker yang berada di Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Bawahnya.
12. Koordinator Asesor PMPRB
13. Melaksanakan pemeriksaan mendadak (Misterious Shoper).
14. Melaksanakan pemeriksaan saber pungli.
15. Melaksanakan pengawsaan kepatuhan pelaporan E LHKPN.
16. Meningkatkan standar pelayanan dengan target nilai Peningkatan Kapabilitas APIP level 3.
17. Meningkatkan standar pelayanan dengan target nilai Maturitas SPIP level 3.
18. Meningkatkan kualitas pengawsan berbasis teknologi informasi.
19. Melaksanakan Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (UIP3).

B. PROGRAM

Kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program :

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik.
2. Program Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
3. Program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

BAB V
PROGRAM KERJA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan arahan pembangunan hukum yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019, program kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun Anggaran 2019 telah melakukan hasil restrukturisasi program bahwa satu Eselon I satu Program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

A. Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan meliputi kegiatan sebagai berikut :

3. Pemeriksaan kasus (pengaduan/ Penangan pengaduan masyarakat).

Pada tahun anggaran 2019 diperkirakan Badan Pengawasan akan menangani surat pengaduan ± sejumlah 3.077 (tiga ribu lima ratus) surat pengaduan yang akan ditangani dengan pembentukan tim dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung ± sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) sedangkan 429 surat pengaduan akan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding masing-masing.

4. Pengawasan reguler

Pengawasan reguler akan dilaksanakan di beberapa Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di wilayah I, II, III dan IV dengan obyek pemeriksaan meliputi: Manajemen Peradilan, Administrasi Peradilan, Pelayanan Publik, dan pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah I** direncanakan pada :

A. Tanggal **22 Februari s/d 4 Maret 2019** dan sebanyak 15 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Pengadilan Tinggi			
	Umum	Agama	TUN	Militer
Aceh	PT Aceh	MS Aceh		
Sumut	PT Medan	PTA Medan	PT TUN Medan	
Sumbar	PT Padang	PTA Padang		
Riau	PT Pekanbaru	PTA Pekanbaru		
Jambi	PT Jambi	PTA Jambi		
Sumsel	PT Palembang	PTA Palembang		
Bangka Belitung	PT Bangka Belitung	PTA Bangka belitung		

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah II** direncanakan pada :

A. Tanggal 14 s/d 25 Maret 2019 sebanyak 20 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Pengadilan Tinggi			
	Umum	Agama	TUN	Militer
DKI Jakarta	PT Jakarta	PTA Jakarta	PT TUN Jakarta	Dimilti
				Dimiltama
Jawa Barat	PT Bandung	PTA Bandung		
Jawa Tengah	PT Semarang	PTA Semarang		
Jawa Timur	PT Surabaya	PTA Surabaya	PT TUN Surabaya	Dimilti
Bali	PT Denpasar			
Eselon 1	Badilum	Badilag	Badimiltun	
	Kepaniteraan	Litbang	BUA	

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah III** direncanakan pada :

A. Tanggal 28 Maret sd 1 April 2019 sebanyak 15 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Pengadilan Tinggi			
	Umum	Agama	TUN	Militer
Kalimantan Barat	PT Pontianak	PTA Pontianak		
Kalimantan Tengah	PT Palangkaraya	PTA Palangkaraya		
Kalimantan Selatan	PT Banjarmasin	PTA Banjarmasin		
Kalimantan Timur	PT Samarinda	PTA Samarinda		
Sulawesi Utara	PT Manado	PTA Manado		
Sulawesi Selatan	PT Makasar	PTA Makasar	PT TUN Makasar	
Gorontalo	PT Gorontalo	PTA Gorontalo		

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah IV** direncanakan pada :

A. Tanggal 4 s/d 8 April 2019 sebanyak 20 satker, terdiri dari:

Propinsi	Pengadilan Tinggi			
	Umum	Agama	TUN	Militer
Maluku	PT Maluku	PTA Maluku		
Maluku Utara	PT Ternate	PTA Ternate		
Nusa Tenggara Timur	PT Kupang	PTA Kupang		
Nusa Tenggara Barat	PT Mataram	PTA Mataram		
Papua	PT Jayapura	PTA Jayapura		

5. **Monitoring**

Laporan Tindak Lanjut LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan :

Pelaksanaan Monitoring untuk **Wilayah I** direncanakan pada: Tanggal 9 s/d 20 Mei 2019 sebanyak 25 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
NAD	Bireun			
Sumatera Utara	Tebing Tinggi	Sibolga	Medan	
	Simalungun			
Sumatera Barat	Pasaman Barat	Pasaman Barat		
		Sijunjung		
		Muara Labuh		
Riau	Rengat Indragiri Hulu	Selat Panjang		
Jambi	Muara Bungo	Bangko		
Sumatera Selatan	Lubuk Linggau			
Bandar Lampung	Kalianda	Kalianda		
Bengkulu	Bengkulu	Bintuhan	Bengkulu	

Pelaksanaan Monitoring untuk **Wilayah II** direncanakan pada: Tanggal 23 Mei s/d 3 Juni 2019 sebanyak 14 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Jawa Timur	Surabaya	Surabaya	Surabaya	Madiun
	Bangil	Gersik		
	Kepanjen	Pasuruan		
	Probolinggo			
	Pamekasan			
	Malang			
	Bojonegoro			
DIY			Yogyakarta	Yogyakarta

Pelaksanaan Monitoring untuk **Wilayah III** direncanakan pada: Tanggal 6 Mei s/d 17 Juni 2019 sebanyak 9 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Kalimantan Barat	Bengkayang	Bengkayang		
Kalimantan Selatan	Martapura			
	Batu Licin			
Kalimantan Timur	Bontang	Bontang		
	Tenggarong			
Kalimantan Tengah	Banjarmasin			Banjarmasin
Sulawesi Selatan	Barru	Masamba		
	Palopo			
	Watansoppeng			

Pelaksanaan Monitoring untuk **Wilayah IV** direncanakan pada: Tanggal 20 s/d 24 Juni 2019 sebanyak 11 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Maluku	Masohi	Masohi		
Nusa Tenggara Barat	Praya	Praya		
Nusa Tenggara Timur	Soe			Kupang
	Atambua			
Papua	Jayapura		Jayapura	
Maluku Utara	PT Maluku Utara	PTA Maluku Utara		

6. Pemeriksaan Keuangan/ Reviu

Pelaksanaan Pemeriksaan Reviu direncanakan pada:

Inspektur Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
Wilayah I		1. Pengadilan Tinggi Medan 2. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 3. Pengadilan Negeri Bukit Tinggi 4. Pengadilan Negeri Sabang
Wilayah II		1. Pengadilan Negeri Denpasar 2. Pengadilan Negeri Bangkalan
Wilayah III		1. Pengadilan Negeri Samarinda 2. Pengadilan Tinggi Makasar
Wilayah IV		1. Pengadilan Agama Dompu 2. Pengadilan Negeri Kupang

5. Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja serta perilaku Aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah I** direncanakan pada: Tanggal 9 s/d 20 Mei 2019 sebanyak 25 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Aceh	Sinabang	Sinabang		
	Calang	Calang		
	Jantho	Jantho		
		Sabang		
Kepri		Natuna		
Jambi	Sungai Penuh	Sungai Penuh		
	Tebo	Tebo		
Sumatera Selatan	Kayu Agung	Kayu Agung	Palembang	
Lampung	Metro	Metro		
Bengkulu	Arga Makmur	Arga Makmur		
	Tubei	Lebong		
Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Tanjung Pandan		
	Tanjung Pandan	Sungai Liat		

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah II** direncanakan pada: Tanggal 23 Mei s/d 3 Juni 2019 sebanyak 25 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Jawa Barat		Kuningan		
		Karawang		
		Purwakarta		
		Cibadak		
		Sumber		
Jawa Tengah	Kendal	Purwokerto		
	Demak	Banjarnegara		
	Kebumen	Brebes		
	Sragen			
	Mungkid			
Jawa Timur	Pacitan	Bojonegoro		
	Trenggalek	Jember		
	Ponorogo			
	Krakasaan			
	Banyuwangi			
	Situbondo			
Banten	Rangkasbitung	Rangkasbitung		
	Pandeglang	Pandeglang		

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah III** direncanakan pada: Tanggal 6 Mei s/d 17 Juni 2019 sebanyak 20 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Kalimantan Barat	Singkawang	Sintang		
	Ketapang			
Kalimantan Tengah	Buntok	Buntok		
	Palangkaraya			
Kalimantan Selatan	Pelaihari	Barabai		
		Kandangan		
Kalimantan Utara	Nunukan			
Sulawesi Utara	Tondano	Tondano		
Sulawesi Selatan	Pare - Pare			
	Sengkang			
	Makale			
	Sungguminasa			
	Bantaeng			
Sulawesi Tenggara	Andoolo	Andoolo		
		Pasarwajo		

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah IV** direncanakan pada: Tanggal 20 s/d 24 Juni 2019 sebanyak 8 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Nusa Tenggara Barat	Bima	Giri Menang	PTUN Mataram	
	Giri Menang			
Nusa Tenggara Timur	Soe	Soe		
	Kefamenanu	Kefamenanu		
Papua		Sentani		
Maluku Utara	Soasiu	Soasiu		
		Tobelo		
Papua Barat	Sorong			

6. Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa direncanakan pada:

Inspektur Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
Wilayah I		Pengadilan Siak Sri Indrapura
Wilayah II		Pengadilan Negeri Sampang
Wilayah III		Pengadilan Pangkajene
Wilayah IV		Pengadilan Masohi

7. Audit Manajemen Kepegawaian

Audit Kepegawaian yang akan dilaksanakan pada:

Inspektur Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
Wilayah I	April Minggu III	Lampung
Wilayah II	Tanggal 1-5 Juli 2019	Denpasar
Wilayah III	Tanggal 1-5 Juli 2019	Manado
Wilayah IV	April Minggu IV	Ternate

8. Pelaksanaan Pemeriksaan Evaluasi LKJiP direncanakan pada:

Inspektur Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
Wilayah I	26-30 Agustus	Pengadilan Tinggi Palembang
Wilayah II	26-30 Agustus	Surabaya, Semarang, MA dan Eselon I
Wilayah III	26-30 Agustus	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Wilayah IV	26-30 Agustus	Pengadilan Tinggi Kupang

9. Pemeriksaan Pengelolaan Anggaran, Pemeriksaan LK, Reviu RKA-KL dan Reviu RKBMN.

Nama Kegiatan	Inspektur Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
Pemeriksaan Pengelolaan Anggaran	Wilayah II	14-18 jan 2018 1-8 Feb 2018 14-18 Okt 2019	Jawa Barat
Pemeriksanaan LK	Wilayah II	18-22 Feb 2019, 22-26 Juli 2019	Jawa Barat DKI Jakarta
Reviu RKA-KL dan Reviu RKBMN	Wilayah II	22-26 Juli 2019, 19-23 Agus 2019, 14-18 Okt 2019	Jawa Barat

10. Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal

Nama Kegiatan	Inspektur Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
Analisa Kebijakan	- Wilayah I - Wilayah II - Wilayah III - Wilayah IV	1-5 Juli 2019 Dan 23-27 Des 2019	Jakarta

B. Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ini meliputi :

I. Tenaga Pengawas Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Sistem Pengawasan

051 Dokumen Perencanaan

- A Perencanaan Renstra/Renja/RKA-KL
Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perencanaan : Rakorbangpus, Trilateral Meeting Pagu Indikatif (Januari sd April 2019)

Penyusunan : Penjabaran Pagu Indikatif dalam Renja dan RKA-KL, Penyesuaian Angka Dasar, Inisiatif Baru, dan Pagu anggaran K/L (Mei sd Juli 2019)

Pembahasan : Penyusunan RKA-KL Alokasi Anggaran, Pembahasan dengan DPR untuk new inisiatif, Penyesuaian New Inisiatif, Penelaahan RKA-KL, Hasil Penelaahan sebagai bahan penyusunan RUU APBN, Penetapan alokasi Anggaran K/L (Agustus sd Oktober 2019)

Penetapan : Penyerahan DIPA ke satuan kerja masing-masing (Nop sd Des 2019)

053 A Pengelolaan Perbendaharaan

Penyusunan LPJ bendahara dan Revolving uang persediaan dilaksanakan setiap bulan selama Januari s.d. Desember 2019.

054 A Pengelolaan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan setiap bulan, trimester, semester dan tahunan.

- 052 A Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**
- Quality Assurance**
Akan dilaksanakan pada bulan April dan Mei, yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di Jambi dan Mataram.
- Consulting**
Akan dilaksanakan pada bulan April dan Mei, yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di Manado
- Pembinaan Sistem Pengaduan**
Sosialisasi pengaduan akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Agustus, yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di : Makasar dan Banten.
- TLHP BPK**
Dilaksanakan Januari s.d. Desember tahun 2019.
- LO Pendampingan**
Dilaksanakan Januari s.d. Desember tahun 2019. sesuai permintaan BPK atau satker.
- Pemeriksaan lintas Propinsi / tujuan tertentu / cek fisik / saber pungli / investigasi / unit intelejen / sidak**
Dilaksanakan Januari s.d. Desember tahun 2019.
- Pemanggilan dan perjalanan lainnya**
Dilaksanakan Januari s.d. Desember tahun 2019. sesuai permintaan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan para pihak terkait.
- Perjalanan Pimpinan/Hakim Agung/Supervisi**
Dilaksanakan Januari s.d. Desember tahun 2019. sesuai jadwal atau permintaan pimpinan.
- Pemeriksaan dilokasi perkantoran yang sama**
Dilaksanakan Januari s.d. Desember tahun 2019.
- Sidang MKH**
Dilaksanakan Januari s.d. Desember tahun 2019.
- Penguatan Hakim Pengawas bidang**
Pelaksanaan pembinaan hakim pengawas bidang akan dilaksanakan pada bulan April dan Mei. Yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di Denpasar dan Pangkal Pinang.
- IACM**
Dilaksanakan pada 22-26 Juli 2019 dan 26-30 Agustus 2019.
- Penilaian Maturitas SPIP**
Dilaksanakan pada 16-21 Desember 2019
- Reviu PIPK**
Dilaksanakan pada 9-13 Desember 2019
- Evaluasi E-Government**
Dilaksanakan pada 9-13 Desember 2019
- Kerjasama antar instansi pemerintah**
Kegiatan ini melibatkan instansi MENPAN dan RB, TP 5000, Komisi Yudisial, Ombudsman, Kementerian Keuangan, Bappenas dan BPKP pada bulan Februari, Mei, Agustus dan Nopember 2019

- 056 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi**
Laporan Tahunan Badan Pengawasan MA RI
Dilaksanakan pada 14-26 Januari 2019.
Laporan Tahunan MA RI
Dilaksanakan pada 14-26 Januari 2019.
Penyusunan LKjIP Bawas
Dilaksanakan pada 7-25 Januari 2019 dan Finalisasi tanggal 4-15 Februari 2019.
Reformasi Birokrasi MA RI dan Penilaian Zona Integritas
Pelaksanaan evaluasi RB Mahkamah Agung RI bulan April sd Juni 2019
Evaluasi SOP, Evaluasi SP
Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 1-5 April 2019.
Penyusunan Administrasi Tata Laksana
Pelaksanaan pada 1-10 Juni 2019.
Penyempurnaan Buku II, Buku IV
Dilaksanakan pada Januari s.d. Desember 2019.
Pengelolaan TLHP Bawas
Pelaksanaan kegiatan ini pada bulan Agustus sd September 2019
- 057 Pengelolaan Kepegawaian**
Pelantikan Hakim dan Pejabat Struktural
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemeriksa/ Fungsional/Sekretariat
Asesement dan Orientasi HT Pengawas
Dilaksanakan pada tanggal 10 sd 12 April 2019 dan diikuti seluruh Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan MA RI
Penyusunan Administrasi Kepegawaian
Dilaksanakan pada 11-15 Februari 2019, 19-22 Maret 2019, 1-5 Juli 2019, 2-6 September 2019, 11-15 November 2019, 16-20 Desember 2019.
Studi Banding LN
Kegiatan Studi Banding LN ke Benua Eropa akan dilaksanakan dalam rentang waktu Maret sd Desember 2019
Evaluasi SKP
Dilaksanakan pada 18-22 November 2019.
E-LHKPN
Dilaksanakan pada 15 Januari 2019.
Pengembangan SDM Bawas
Dilaksanakan pada 16-20 September 2019.
In House Training Fungsional IT dan SDM Siwas
Dilaksanakan Januari s.d Desember 2019.
- 058 Pelayanan Umum dan Perlengkapan**
Penyusunan Administrasi Umum
Dilaksanakan Januari s.d Desember 2019.
Sistem Informasi Pengawasan
Dilaksanakan pada 11-15 April 2019.

VI. Layanan Perkantoran

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 13 bulan layanan

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

- Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 4
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2019.
- Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 2
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2019.
- Terlaksananya Kegiatan Perkantoran
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2019.
- Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 6
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2019.
- Tersedianya pakaian kerja
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2019
- Terpeliharanya peralatan kantor
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2019.
- Terlaksananya pengiriman surat dinas
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2019.
- Terpeliharanya Jaringan/ Sistem Informasi dan Peralatan IT
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2019.
- Terlaksananya pelaksanaan barang dan jasa
Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2019.
- Pengadaan Pakaian Dinas Pejabat/Hakim Tinggi/Struktural/Staf
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2019.

c. Sewa mesin fotokopi

Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2019.

d. Jamuan rapat/koordinasi/terima tamu/delegasi

Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2019.

VII. Layanan Internal Overhead

a. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Tahap persiapan sampai dengan pelaporan dimulai Bulan Februari sd April 2019. Pengadaan meliputi Laptop, Printer Portable, Laptop SIWAS, Kamera Total (18 unit).

b. Pengadaan Peralatan kantor dan Fasilitas Perkantoran

Tahap persiapan sampai dengan pelaporan dimulai Bulan Februari sd April 2019. Pengadaan meliputi meja pengaduan, Filling Cabinet total (42 Unit)

BAB VI

TANTANGAN KEDEPAN

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah “Fungsi Pengawasan Peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”.

Tantangan kedepan Badan Pengawasan diantaranya:

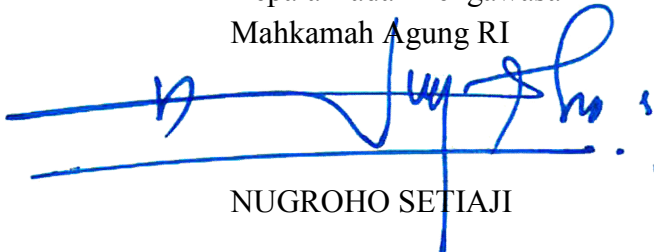
1. Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2. Keterbatasan sumber daya yang tersedia.
3. Masih rendahnya dukungan yang berkelanjutan dan komitmen baik dari internal maupun eksternal secara terus menerus.
4. Belum adanya pedoman mengenai APIP.
5. Luasnya jangkauan pengawasan dan semakin bertambahnya jumlah satuan kerja pengadilan di Indonesia.
6. Semakin bertambahnya kegiatan yang dibebankan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai koordinator kegiatan PMPRB Mahkamah Agung RI dan quality assurance pelaksanaan RB di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

BAB VII PENUTUP

Program kerja tahun 2019 Badan Pengawasan Mahkamah Agung disusun dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2015-2019 yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tahunan (RKT).

Berhasilnya pelaksanaan program kerja tahun 2019 Badan Pengawasan Mahkamah Agung sangat tergantung pada peran aktif aparat pelaksana dan dukungan anggaran dari pemerintah serta pihak-pihak terkait. Akhirnya program kerja tahun 2019 ini dapat dijadikan bahan kajian yang terus disempurnakan untuk bahan perencanaan selanjutnya bagi keberhasilan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, Januari 2019
Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



NUGROHO SETIAJI